

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengendalian Internal memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi termasuk Pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan Pengendalian Internal yang baik di Indonesia. Pengendalian Internal di Indonesia masih sangat minim sekali. Maraknya berita yang sering diungkapkan mengenai berbagai tindakan penyimpangan ataupun kecurangan yang terjadi di Indonesia menjadikan diperlukan adanya pengawasan atau pengendalian internal dalam menjalankan otonomi daerah guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecurangan masih sangat sering terjadi di dalam sebuah organisasi, dikarenakan adanya pengendalian internal yang kurang memadai dalam suatu organisasi. Kasus yang terjadi dalam perkembangan pengelolaan keuangan negara ini menuntut pemerintah untuk responsif dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (4) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus di dukung oleh sistem Pengendalian Internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal. Berdasarkan KPMG *fraud survey 2006* ditemukan bahwa lemahnya pengendalian internal menjadi faktor utama terjadinya kecurangan yaitu sebesar 38% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Dari faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian internal sangat penting (Martani & Zaelani, 2011)

Menurut Nurwati & Trisnawati, (2015) menyatakan Kelemahan Pengendalian Internal merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari

kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Tujuan Pengendalian Pemerintah Daerah adalah melindungi aset Negara baik aset fisik maupun aset data, Memelihara catatan dan dokumen secara terinci dan akurat, Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisasi, Menjamin ditaatinya kebijakan Manajemen dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Banyak faktor yang mempengaruhi turun naiknya kelemahan pengendalian internal, diantaranya adalah Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal. Ukuran Pemerintah Daerah merupakan sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai suatu alat ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas Pemerintah Daerah (Saputro & Mahmud 2015). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan cara mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya dan dapat berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Kristanto 2009).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No:33 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut teori yang dijelaskan sebelumnya, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal jika dikelola dengan baik akan meningkatkan serta berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal (KPI) yang diukur dengan cara menemukan jumlah temuan kasus KPI.

Di Indonesia, data dari IHPS yang di publish oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2015 dan 2016 menunjukkan bahwa pembahasan permasalahan Sistem Pengendalian Internal pada table 1.

Tabel 1. Tingkat Kelemahan Pengendalian Internal

No	Tahun	Keterangan	Permasalahan	Persentase
1.	2015	Kelemahan SPI	211	39,51%
2.	2016	Kelemahan SPI	121	22,65%

Sumber: Ikhtisar Hasil pemeriksaan Semester (IHPS)

Berdasarkan tabel 1, tingkat kelemahan pengendalian internal pada tahun 2015 sebesar 211 kasus dengan tingkat persentase 39,51% dari 534 laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kelemahan pengendalian internal pada tahun 2016 sebanyak 121 dengan tingkat persentase 22,65%. Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada penurunan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 90 permasalahan. Dari temuan tersebut mencerminkan bahwa dari tahun 2015 ke tahun 2016 Sistem Pengendalian Internal mengalami perbaikan sehingga temuan permasalahan dari tahun 2015 ke 2016 menjadi berkurang.

Berapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal. Namun, terdapat hasil yang tidak konsisten dalam pengujian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal yaitu variabel, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh namun ada juga yang menunjukkan hasil yang berpengaruh.

Berdasarkan penelitian Putri & Mahmud (2015) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, semakin besar Ukuran Pemerintah maka dapat mengurangi Kelemahan Pengendalian Internal. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu menurut Martani & Zaelani (2011), Kristanto (2009), yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Adapun menurut Nurwati & Trisnawati (2015) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah Tidak memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, besar kecilnya total asset Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu Fauza (2015), Yeni, dkk (2015), Saputro & Mahmud

(2015), Boyle *et al.* (2004), dan Petrovits *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

Berdasarkan penelitian Martani & Zaelani menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, jika terdapat kenaikan porsi Pengendalian Internal (PAD) dalam model penelitian, maka akan menyebabkan kenaikan Kelemahan Pengendalian Internal. Selain itu penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Adapun menurut Saputro & Mahmud (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, kenaikan dan penurunan PAD tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus Kelemahan Pengendalian Internal (KPI). Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu, Putri & Mahmud (2015), Fauza (2015), Nurwati & Trisnawati (2015), dan Yeni, dkk (2015) yang menyatakan bahwa PAD Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

Lalu berdasarkan penelitian dari Nurwati & Trisnawati (2015) menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, bahwa Belanja Modal ini bisa menjadi obyek korupsi politik dan administratif oleh pihak legislative dan eksekutif. Dikarenakan Belanja Modal yang tinggi belum tentu sistem Pengendalian Internalnya semakin baik, dengan demikian mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyelwenengkan Belanja Modal tersebut. Selain itu penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu, Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Adapun menurut Saputro & Mahmud (2015) menyatakan bahwa Belanja Modal Tidak memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, kenaikan dan penurunan Belanja Modal tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus KPI.

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diketahui bahwa dari perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terlebih dahulu (justifikasi/karakter penelitian), peneliti sebelumnya yaitu Rachmawati & Handayani (2015) menggunakan 5 variabel yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal. Dengan 38 sampel pemerintah daerah kabupaem/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013 dengan metode analisis regresi berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal dengan sampel seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi se-Indonesia tahun 2014 sampai 2016 dengan menerapkan metode regresi linier berganda.

Masih terdapat hasil yang belum konsisten dalam penelitian tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal diantaranya, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih perlunya penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh antar variabel tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- b. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- c. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- b. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- c. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

I.4 Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang pengukuranya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi, khususnya mengenai Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

- b. Tujuan manfaat umum

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal yang pengukuranya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi pemerintah dan laporan realisasi anggaran dalam APBD.

- 2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran kepada pemerintah daerah akan pentingnya Pengendalian Internal. Karena pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan pengendalian

internal yang baik, diharapkan mampu membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat memberikan masukan dan informasi terhadap peningkatan Pengendalian Internal di lingkup pemerintah daerah serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kemajuan daerah. Manfaat praktis lainnya dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian ini kepada pihak yang membutuhkannya.